p-ISSN 2526-4440
e-ISSN 2086-3748

Peran SilPA Sebagai Pemoderasi Dalam Menentukan Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah)

Jaeni[1)]
Andi Kartika [2)]

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang
[1)] jaeni@edu.unisbank.ac.id
[2)] andikartika@edu.unisbank.ac.id

Abstract

This study aims to examine the effect of Regional Original Income (PAD), General Allocation Funds (DAU) and Special Allocation Funds (DAK) on Capital Expenditures which are moderated by Remaining Over Budget Financing (SiLPA). The population in this study is the Regency / City of Central Java Province which consists of 35 Regencies / Cities. This study uses secondary data in the form of the 2015 - 2017 APBD Realization Report. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that partially Regional Original Income (PAD), General Allocation Fund (DAU), and DAK affect the Capital Expenditures. But the Remaining More Budget Financing (SiLPA) partially does not affect Capital Expenditures. While the Remaining More Budget Financing (SiLPA) partially does moderate the relationship of Allocation Funds (DAK) to Capital Expenditures and Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU) does not moderate the relationship to Capital Expenditures.

Keywords: *Local Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Budget Financing Surplus and Capital*

PENDAHULUAN

Perkembangan daerah di Indonesia semakin pesat, seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan disentralisasi fiskal. Salah satu ketetapan MPR yaitu Tap MPR No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah dilaksanakan sendiri oleh masing-masing daerah tersebut, dengan harapan daerah tersebut dapat melaksanakan pembangunan di segala bidang.

Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia didasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004. Dalam UU No.

32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pemerintah daerah memisahkan fungsi eksekutif dengan fungsi legislatif. Berdasarkan fungsinya, Pemerintah Daerah (eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) terjadi hubungan keagenan (Halim & Abdullah, 2006). Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah diharapkan dapat berupaya meningkatkan pelayanan serta fasilitas diberbagai sektor publik untuk dapat melakukan investasi di daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kemandirian daerah.

Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah dapat meningkatkan belanja modal. Belanja modal pada pemerintah daerah dapat bersumber dari berbagai pendapatan dan pembiayaan, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Maka dari itu, Pemerintah daerah harus memperbaiki layanan publik dalam bentuk aset tetap yang termasuk dalam belanja modal, yakni peralatan, infrastruktur dan harta tetap lainnya, karena salah satu penggunaan SiLPA menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung yang dalam hal ini mencakup belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai.

TUJUAN, DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umumnya adalah untuk menguji kembali adanya gap atau ketidakkonsistenan antar peneliti sebelumnya. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

a. Menguji dan menganalisis pengaruh PAD, DAU, DAK, SilPa terhadap Belanja Modal di Jawa Tengah
b. Menguji dan menganalisis SilPA dalam memoderasi pengaruh PAD terhadap Belanja Modal di Jawa Tengah
c. Menguji dan menganalisis SilPA dalam memoderasi pengaruh DAU terhadap Belanja Modal di Jawa Tengah
d. Menguji dan menganalisis SilPA dalam memoderasi pengaruh DAK terhadap Belanja Modal di Jawa Tengah

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

   Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang akan datang serta dapat memberikan bukti empiris mengenai Peran SilPa Sebagai Pemoderasi Dalam Menentukan Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal di Jawa Tengah.

b. Manfaat Manajerial
   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan pemerintah Jawa Tengah untuk lebih mengoptimalkan pendapatan dan dana yang ada dalam membelanjakan modal di Jawa Tengah.
c. Manfaat Kebijakan
   Bagi lembaga pemerintahan, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan penggunaan dan alokasi dana dalam belanja modal.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kontinjensi

Hanu (2006), Sugiarti & Supadmi, 2014 menyatakan bahwa teori kontijensi berdasarkan pada pemikiran bahwa secara universal, tidak terdapat sistem akuntansi manajemen yang tepat yang penerapannya dapat dilakukan pada organisasi. Teori kontijensi yang deskriptif membahas tentang mengapa pemimpin berperilaku berbeda antara satu situasi dengan situasi lainnya, sementara teori kontijensi yang preskriptif membahas perilaku yang paling efektif dalam setiap jenis situasi (Yukl, 2010 dalam Sugiarti & Supadmi, 2014).

Drazin (1985), Mufarrohah, Sutrisno & Purnomosidhi, 2013. Menyebutkan pusat teori kontijensi struktural adalah proposisi bahwa struktur dan proses organisasi harus sesuai konteksnya (karakteristik budaya organisasi, teknologi, ukuran atau tugas) jika ingin bertahan atau menjadi ekeftif. Faktor budaya, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi dan kompetensi merupakan unsur-unsur yang terbentuk dari lingkungan dan memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah.

Hayes (1977) (dalam Mufarrohah, Sutrisno & Purnomosidhi, 2013), menyebutkan aspek kontijensi utama lainnya dari evaluasi kinerja adalah struktur internal dan fungsi sub unit.sifat tugas yang dilakukan, jenis orang, hubungan interpersonal, dan kemampuan untuk mengukur dan menghitung fungsi, semua cenderung bervariasi dengan sub unit.Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan sebagai faktor kontijensi yang memiliki pengaruh terhadap kinerja. Faktor budaya, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi dan kompetensi merupakan unsur-unsur yang terbentuk dari lingkungan dan memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah.

Goal Setting Theory (Teori Penetapan Tujuan)

Teori ini juga menjelaskan bahwa penetapan tujuan yang menantang (sulit) dan dapat diukur hasilnya akan dapat meningkatkan pestasi kerja (kinerja), yang diikuti dengan kemampuan dan keterampilan kerja. Tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan yang dialami instansi harus dipublikasikan melalui laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan pendekatan *goal setting theory*, laporan keuangan pemerintah daerah diasumsikan sebagai tujuan pemerintah daerah, sedangkan variabel *good governance*, SAP dan

kualitas aparatur adalah sebagai faktor penentu. Jika faktor-faktor ini secara baik diterapkan di instansi maka tujuan pemerintah daerah akan tercapai.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan dalam gambar sebagai berikut:

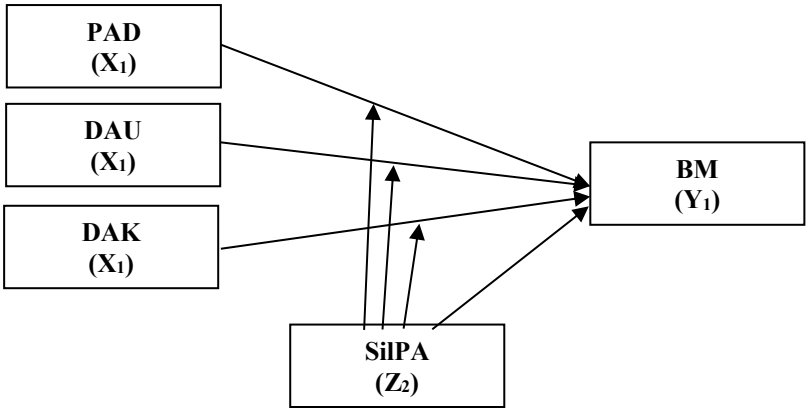

Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus bergantung pada Pemerintah Pusat. Jika dikaitkan dengan teori kontinjensi, yaitu setiap Pemerintah Daerah perlu tepat dalam melakukan tindakan untuk mengefektifkan penggunaan Pendapatan Asli daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga pemerintah harus berperilaku berbeda antara situasi satu dengan lainnya agar dapat membentuk Belanja Modal yang tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Aditiya dan Dirgantari (2017) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini dapat diartikan bahwa jika Pendapatan Asli Daerah meningkat, maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin meningkat. Selain itu besarnya Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Berdasarkan penelitian tersebut, maka menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H_1: PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan operasioanal daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jika dikaitkan dengan teori kontinjensi dan teori Penetapan Tujuan (*Goal Setting Theory*) pemerintah mengoptimalkan dan menetapkan tujuan dan sasaran penggunaan Dana Alokasi Umum di setiap daerah. Maka dari itu, setiap pemerintah daerah mempunyai kebijakan dalam penggunaan Dana Alokasi

Umum. Hal ini sejalan dengan teori kontinjensi dimana setiap daerah memiliki kebijakan berbeda antara satu situasi dengan situasi lainnya, karena APBD tergantung pada situasi yang dihadapi dan mana yang lebih efektif, sehingga persentase Dana Alokasi Umum akan berbeda antara satu Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota yang lainnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) hasil penelitiannya mengemukakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa, semakin besar jumlah Dana Alokasi Umum yang diperoleh Pemerintah Daerah maka akan semakin besar pula Belanja Modal Pemerintah Daerah tersebut. Berdasarkan penelitian tersebut, maka menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H_2: DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang berfungsi untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan suatu daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Jika dikaitkan dengan teori penetapan tujuan (*Goal Setting Theory*) pemerintah daerah harus dapat menetapkan tujuan penggunaan Dana Alokasi Umum dengan tepat agar Dana Alokasi Umum bisa digunakan dengan baik untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal (2008) dan Oktora (2012) menunjukan bahwa berpendapat bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal ini dapat diartikan bahwa, semakin besar jumlah Dana Alokasi Umum yang diperoleh Pemerintah Daerah maka akan semakin besar pula Belanja Modal Pemerintah Daerah tersebut. Berdasarkan penelitian tersebut, maka menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H_3: DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD yang ada dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu indikator bagi rekanan pemerintah daerah (Pemda) dalam membuat keputusan perencanaan investasi. Maka dari itu untuk dapat meningkatkan jumlah investor, Pemda harus memperbaiki layanan publik dalam bentuk aset tetap yang termasuk dalam belanja modal, yakni peralatan, infrastruktur dan harta tetap lainnya, karena salah satu penggunaan SiLPA adalah untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung yang dalam hal ini mencakup belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai. Jika dikaitkan dengan teori kontijensi dan penetapan tujuan (*Goal Setting Theory*) pemerintah daerah harus dapat menetapkan tujuan penggunaan SiLPA dengan tepat agar SiLPA bisa digunakan dengan baik untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah tersebut. Serta, menurut teori kontinjensi pemerintah daerah harus berperilaku berbeda demi mengefektifkan penggunaan SiLPA agar dapat membentuk belanja modal yang

tinggi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siswantoro (2014) mengemukakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa SiLPA tahun sebelumnya sangat berpengaruh pada alokasi belanja tahun berikutnya. Berdasarkan penelitian tersebut, maka menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H_4: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Memoderasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) diduga dapat memperkuat pengaruh PAD terhadap belanja modal. Semakin besar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran suatu daerah akan meningkatkan PAD dan belanja modal. Peningkatan Pemerintah Daerah dalam investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Mardiasmo,2002:132). Bila dikaitkan dengan teori kontinjensi pemerintah daerah harus berperilaku berbeda demi mengefektifkan Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sehingga membentuk belanja modal yang tinggi. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel pemoderasi. Besarnya perolehan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran diduga dapat memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

H_5: SILPA memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerahterhadap Belanja Modal

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Memoderasi Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum merupakan sumber keuangan di daerah yang memungkinkan pemerintah daerah membangun infrastuktur yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana Alokasi Umum digunakan untuk memeratakan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Setiap daerah pasti memiliki SiLPA tahun sebelumnya, maka semakin banyak Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran akan semakin banyak juga digunakan untuk belanja modal. Tingkat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dapat memperkuat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.Semakin besar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran suatu daerah seharusnya dapat meningkatkan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Bila dikaitkan dengan teori kontinjensi dan teori penetapan tujuan (*Goal Setting Theory*) pemerintah daerah harus bisa berperilaku berbeda dalam satu situasi dengan situasi lainnya serta menentukan tujuan penggunaan dana pada daerah tersebut dengan tepat. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel pemoderasi. Besarnya perolehan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran diduga dapat memperkuat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

p-ISSN 2526-4440
e-ISSN 2086-3748

H_6: SILPA memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Memoderasi Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus dipergunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup (UU No. 33 tahun 2004). Dengan adanya Dana Alokasi Khusus diharapkan dapat mempengaruhi belanja daerah, karena Dana Alokasi Khusus cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Setiap daerah pasti memiliki SiLPA tahun sebelumnya, semakin besar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran suatu daerah seharusnya dapat meningkatkan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Bila dikaitkan dengan teori kontinjensi dan teori penetapan tujuan (*Goal Setting Theory*) pemerintah daerah harus bisa berperilaku berbeda dalam satu situasi dengan situasi lainnya serta menentukan tujuan penggunaan dana pada daerah tersebut dengan tepat. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel pemoderasi. Besarnya perolehan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran diduga dapat memperkuat pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

H_7: SILPA memoderasi pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan objek kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah dalam periode waktu 2015-2017 secara time series (runtut waktu), sehingga sampel penelitian ini (n) sebanyak 35 x 3 = 105 data. Objek penelitian ini diinterprestasikan melalui variable PAD, DAU, DAK dan SilPA sebagai variabel independen, Belanja Modal sebagai variabel dependen, serta SilPA sebagai variabel moderasi. Populasi adalah jumlah dari keseluruhan objek-objek atau (satuan/individu) yang mempunyai karakteristik tertentu. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu data PAD, DAU, DAK, SiLPA dan Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Penelitian ini mengambil semua populasi dijadikan sampel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Statistik deskriptif semua variabel yang digunakan dalam model disajikan dalam table 1. berikut.

p-ISSN 2526-4440
e-ISSN 2086-3748

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	105	152044596332,00	3067274791140,00	404877538820,6190	480179128224,83110
DAU	105	400176755000,00	1398539653000,00	938814774161,9043	244641792176,31700
DAK	105	3750100000,00	483813446054,00	210324013267,8286	125359439802,79211
SILPA	105	43648225790,00	1194348650680,00	244217877891,1144	155519055854,88766
BM	105	51980727019,00	1275359088966,00	376613521448,9713	181715800790,98755
Valid N (listwise)	105				

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai maksimum, minimum dan rata-rata masing-masing variabel penelitian yang digunakan. Variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, dan SiLPA.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel memiliki distribusi normal atau tidak. Pada penelitian uji normalitas ini menggunakan uji yaitu *skewness* dan *kurtosis*. Berdasarkan hasil output uji normalitas di peroleh perhitungan *skewness* dan *kurtosis* sebagai berikut:

Tabel 2. Uji Normalitas (Sebelum Outlier)

Descriptive Statistics

	N	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	105	1,488	,236	4,874	,467
Valid N (listwise)	105				

$$\text{Zskewness} = \frac{1{,}488}{\sqrt{(\frac{6}{105})}} = 6{,}224 \qquad \text{Zkurtosis} = \frac{4{,}874}{\sqrt{(\frac{24}{105})}} = 10{,}194$$

Berdasarkan hasil output uji normalitas diatas, diperoleh nilai *skewness* sebesar 6,224 > 1,96 dan *kurtosis* sebesar 10,194 > 1,96 (dengan tingkat signifikan 0,05). Hasil uji normalitas tersebut tidak memenuhi syarat dalam hal ini data tidak terdistribusi secara normal, maka dari itu dilakukan *outlier* data untuk membuat data menjadi normal. *Outlier* adalah kasus data yang memiliki karakteristik unik yang terlibat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi (Ghozali, 2011:41). Hasil pengujian normalitas setelah mengeluarkan *outlier* sebanyak 8 data, dapat dilihat pada tabel 3. berikut:

p-ISSN 2526-4440
e-ISSN 2086-3748

Tabel 3. Uji Normalitas (Setelah Outlier)

Descriptive Statistics

	N	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	97	,422	,245	,857	,485
Valid N (listwise)	97				

$$\text{Zskewness} = \frac{0{,}422}{\sqrt{(\frac{6}{97})}} = 1{,}67 \qquad \text{Zkurtosis} = \frac{0{,}857}{\sqrt{(\frac{24}{97})}} = 1{,}72$$

Berdasarkan hasil output uji normalitas diatas, setelah *outlier* dengan jumlah data yang digunakan sebanyak 97 data. Jumlah data yang di *outlier* sebanyak 8 data dari 105 data. Hasil tersebut diperoleh dengan nilai *skewness* sebesar 1,67< 1,96 dan nilai *kurtosis* sebesar 1,72< 1,96 (dengan signifikan pada 0,05), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang diolah memenuhi syarat uji normalitas.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi ditunjukkan pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Asumsi Klasik

VARIABEL		HASIL
PAD	*Tolerance*	0,823
	VIF	1,215
	Sig. Heterokedastisitas	0,247
DAU	*Tolerance*	0,456
	VIF	2,193
	Sig. Heterokedastisitas	0,427
DAK	*Tolerance*	0,492
	VIF	2,034
	Sig. Heterokedastisitas	0,701
SilPA	*Tolerance*	0,673
	VIF	1,486
	Sig. Heterokedastisitas	0,794
Durbin-watson		1,866

Hasil pengujian asumsi klasik telah memenuhi asumsi klasik, untuk hasil uji multikolinearitas nilai VIF nya < 10; untuk heteroskedastisitas seluruh variable independen tidak signifikan terhadap residual (> 0,05); dan untuk uji autokorelasi menghasilkan angka Durbin-Watson 1,866 berada pada area *no-autocorrelation.*

Uji Model dan Uji Hipotesis

Hasil uji model dan uji hipotesis disajikan pada Tabel 5 berikut.

p-ISSN 2526-4440
e-ISSN 2086-3748

Tabel 5. Hasil Uji Model dan Uji Hipotesis

	VARIABEL	HASIL
PAD	Nilai t hitung	2,993
	Koefisien	0,155
	Sig.	0,000
DAU	Nilai t hitung	1,796
	Koefisien	0,175
	Sig.	0,076
DAK	Nilai t hitung	3,787
	Koefisien	0,804
	Sig.	0,000
SilPA	Nilai t hitung	0,098
	Koefisien	0,331
	Sig.	0,742
PAD_SilPA	Nilai t hitung	-0,724
	Koefisien	9,499E-014
	Sig.	0,471
DAU_SilPA	Nilai t hitung	0,284
	Koefisien	9,941E-014
	Sig.	0,777
DAK_SilPA	Nilai t hitung	-3,049
	Koefisien	2,222E-012
	Sig.	0,003
F hitung		40,896
Signifikansi		0,000
Adj R square		0,658

a. Dependen Variabel: BM

Hasil uji model menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian dinyatakan memenuhi *goodness of fit* model nilai F hitung sebesar 40,986 signifikan 0,000. Kemampuan menjelaskan variable independen terhadap variable dependen sebesar 65,8% (0,658).

Hasil pengujian pada hipotesis *pertama* yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, diterima. Hasil uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,004 > 0,05. Pada hipotesis *kedua* menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, diterima. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,076 < 0,10. Pada hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, diterima dan diperoleh nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa SilPA berpengaruh positif terhadap Belanja Modal tidak diterima, karena nilai signifikansinya sebesar 0,742 > 0,05.

Pada pengujian hipotesis kelima yang menyatakan bahwa SILPA memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal tidak di terima, karena nilai signifikansinya sebesar 0,471 > 0,05. Hipotesis keenam yang menyatakan bahwa SILPA memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal tidak diterima, hal ini karena nilai signifikansinya sebesar 0,777 >

0,05. Hipotesis ke tujuh yang menyatakan SILPA memoderasi pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal, tidak diterima karena koefisien mempunyai arah negatif dan nilai signifikansinya sebesar 0,003. dan mempunyai arah positif. Hipotesis *ketiga* menyatakan bahwa leverage memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan, diterima. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05, dan mempunyai arah koefisien negatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, sedangkan SilPA tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SilPA mampu memoderasi/memperlemah pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal, namun Silpa tidak mampu memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

SARAN

Penelitian lebih lanjut dilakukan dengan menggunakan sampel yang lebih luas tidak untuk propinsi Jawa Tengah saja, namun dapat dilakukan di propinsi lain bahkan di seluruh indonesia. Demikian juga untuk penelitian selanjutnya dapat menambah jangka waktu penelitian yang lebih lama, misal 5 tahun.

DAFTAR REFERENSI

Aditiya dan Dirgantari. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah Tahun 2013-2015. Vol. XV No.1, Maret 2017

Alfasadun, dkk.(2017). Karakteristik Daerah Terhadap Belanja Modal Dengan Pemoderasi Pertumbuhan Ekonomi. Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, Mei 2017, Hal: 53- 66 Vol. 6, No. 1

Ardhani, Pungky (2011). skripsipengaruh pertumbuhan ekonomi,pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. (studi pada pemerintah kabupaten/kota di jawa Tengah. Universitas Diponegoro.

Bastian.(2006). Akuntansi Sektor Publik.Erlangga. Surabaya

Darwanto dan Yustikasari, Yulia, Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, Makalah disajikan pada Seminar Antar bangsa di Universitas Hassanudin, Makassar, 26-28 Juli 2007.

Halim, Abdul & Abdullah Syukrie. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. Jurnal Akuntansi Pemerintah 2 (1): 53-64. Hair, et al. 1998.Multivariate Data Analisys, Fifth Edition, Prentice-Hall International. New Jersey.

Hermawan, Rudi, (2017). Skripsi pengaruh pendapatan asli daerah (pad), dana perimbangan, dan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) terhadap belanja modal. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Kusumawardani, Ismawulan. (2018). skripsi pengaruh pad, dau, dak, silpa dan pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi belanja modal di kabupaten/kota jawa tengah tahun 2010-2015.Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Mahargono, Imaniar, Putri. (2017). skripsi pengaruh pad, dau, dak dan silpa terhadap alokasi belanja modal di jawa timur.Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.

Oktora, Fahri, Eka. (2013). Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah.Vol. 2 No. 1.

Palealu, Andreas, Marzel. (2013). Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012. Vol.1 No.4, Hal. 1189-1197.

Purnama, Arif, (2014). Skripsi pengaruh dana alokasi umum (dau), pendapatan aslidaerah (pad), sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa), dan luas wilayah terhadap belanja modal padakabupaten dan kota di jawa tengah periode 2012-2013. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Siswantoro, Dodik. (2014). skripsipengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap belanja modal. Universitas Indonesia.

Sugiarthi dan Supadmi.(2014). Pengaruh PAD, DAU, dan SILPA pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi.E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.2 (2014): 477-495.

Sumarmi, Saptaningsih (2009). skripsi pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal daerah kabupaten/kota di provinsi d.i. Yogyakarta. Universitas PGRI Yogyakarta.

Syaiful.(2006). Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan. Artikel

Tuasikal, Askam. Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotadi Indonesia. Vol. 1, No. 2.Juli 2008Hal.142-155.

Wahyuningsih, Panca dan Widaryanti. Peningkatan PAD dan DAU Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah.Vol.12 No. 1 Maret 2015.

Wandira, Gugus, Arbie; 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Accounting Analysis Journal, Vol. 2, No. 1.

Yana, Widya, (2018). skripsi pengaruh pad, dau, dbh dan dok terhadap belanja modal dengan silpa sebagai variabel pemoderasi pada kabupaten/kota di provinsi aceh.Universitas Sumatera Utara Medan.

https://sinta.unud.ac.id

https://repository.ump.ac.id